



Analisis Collaborative Governance Berbasis Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Mali Kabupaten Alor

Antonius Koby

Fakultas Ekonomi – Universitas Tribuana Kalabahi – Alor – NTT

Received: 26 Desember 2025
Revised: 31 Desember 2025
Accepted: 02 Januari 2026

Abstrak

Tourism is a strategic sector for driving regional economic growth and improving community welfare. However, tourism development requires a collaborative approach involving various stakeholders. This study aims to analyze the implementation of pentahelix-based collaborative governance in the development of tourism at Mali Beach, Alor Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants included local government officials, local communities, tourism businesses, academics, and the media. The results indicate that the role of pentahelix stakeholders has not been optimally and equally implemented. Local government still dominates, while academic and media involvement is relatively low. Weak coordination, low participation in joint making decision, and the absence of a collaborative forum are major obstacles to the development of tourism at Mali Beach. This study recommends strengthening collaborative governance mechanisms through the establishment of an inclusive and sustainable pentahelix collaborative forum.

Keywords: Collaborative Governance, Pentahelix, Sustainable Tourism, Mali Beach, Alor Regency

(*) Corresponding Author: boloangwakkal@gmail.com

How to Cite: Koby, A. (2026). Analisis Collaborative Governance Berbasis Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Mali Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.D), 209-219. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13690>

LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan nasional karena kemampuan menggerakkan sektor ekonomi lainnya secara simultan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah di berbagai wilayah terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal, termasuk di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal seperti Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Alor dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang khas khususnya potensi wisata bahari. Salah satu destinasi unggulan yang memiliki prospek besar dan sebagai icon wisata adalah **Pantai Mali**, yang terletak di Kecamatan Kabola. Pantai Mali tidak hanya berfungsi sebagai kawasan rekreasi masyarakat lokal, tetapi juga memiliki daya tarik wisata alam yang unik, seperti panorama pesisir, ekosistem laut serta keberadaan **dugong jinak** yang menjadi daya tarik langka dan bernilai konservasi tinggi. Potensi tersebut menjadikan Pantai Mali sebagai destinasi yang strategis untuk dikembangkan sebagai **pariwisata berkelanjutan**. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan pesisir sering menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan tata kelola, koordinasi kelembagaan serta keterlibatan stakeholder yang belum optimal. Bramwell dan Lane (2011) menegaskan bahwa lemahnya tata kelola kolaboratif

menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya di destinasi yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda. Hal ini juga diperkuat oleh Hall (2011) yang menyatakan bahwa tanpa mekanisme kolaborasi yang jelas, pengembangan pariwisata cenderung bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan.

Dalam konteks Pantai Mali, pengembangan pariwisata belum sepenuhnya didukung oleh sistem kolaborasi yang terstruktur. Peran masing-masing stakeholder baik pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, akademisi dan media masih berjalan secara parsial. Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar stakeholder cenderung bersifat informal dan tidak berkelanjutan, koordinasi kelembagaan belum difasilitasi melalui forum kolaboratif formal serta pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan program, lemahnya rasa memiliki serta rendahnya efektivitas pengembangan pariwisata Pantai Mali.

Sejumlah penelitian terdahulu di Indonesia mengonfirmasi bahwa pendekatan **pentahelix** merupakan model yang relevan dalam mengatasi persoalan tata kelola pariwisata. Nugroho, dkk. (2018) menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha mampu meningkatkan keberlanjutan destinasi wisata jika didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang efektif. Sementara itu, Situmorang dan Mirzanti (2019) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan aktor non-pemerintah dalam perencanaan pariwisata berbasis komunitas agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara merata. Model pentahelix semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep **collaborative governance** yang dikemukakan oleh Thomson dan Perry (2006). Mereka menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh lima dimensi utama, yaitu komunikasi, koordinasi, kepercayaan, pengambilan keputusan bersama dan komitmen kolektif antar aktor. Dalam konteks Pantai Mali, kelima dimensi tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga kolaborasi yang terbangun belum mampu mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam **bagaimana collaborative governance berbasis pentahelix dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali, Kabupaten Alor** serta mengidentifikasi hambatan dan peluang penguatan kolaborasi antar stakeholder. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian *collaborative governance* di sektor pariwisata, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mengelola Pantai Mali secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model pemerintahan hierarkis dan pasar dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks dan multidimensional. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif. Pendekatan ini menempatkan seluruh aktor sebagai mitra setara yang memiliki peran dan tanggung jawab bersama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Thomson dan Perry (2006) menekankan bahwa *collaborative governance* bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan sebuah proses sosial yang dibangun melalui interaksi

berkelanjutan antar aktor. Mereka mengidentifikasi beberapa dimensi kunci dalam kolaborasi, yaitu tata kelola (*governance*), administrasi, otonomi organisasi, kebersamaan (*mutuality*) dan kepercayaan (*trust*). Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan kolaborasi dalam mencapai tujuan kolektif.

Dalam konteks kebijakan publik, komunikasi menjadi fondasi utama *collaborative governance*. Komunikasi yang intensif dan berkelanjutan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyamaan persepsi serta pembentukan pemahaman bersama terhadap tujuan dan strategi kolaborasi (Emerson, et al., 2012). Tanpa komunikasi yang efektif, kolaborasi cenderung bersifat simbolik dan tidak mampu menghasilkan sinergi nyata antar aktor.

Selain komunikasi, kepercayaan antar stakeholder juga memegang peran krusial. Kepercayaan mendorong aktor untuk bersedia berbagi sumber daya, mengurangi sikap defensif serta menerima risiko yang melekat dalam kerja kolaboratif (Bryson, et al., 2015). Dalam konteks pariwisata, tingkat kepercayaan yang rendah seringkali menjadi penghambat utama dalam pembentukan kolaborasi lintas sektor, khususnya antara pemerintah dan aktor non-pemerintah seperti masyarakat dan pelaku usaha.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *collaborative governance* sangat relevan diterapkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Bramwell dan Lane (2011) menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang melibatkan banyak kepentingan, sehingga membutuhkan mekanisme tata kelola kolaboratif untuk mengelola konflik, menjaga keberlanjutan sumber daya dan memastikan pemerataan manfaat. Hall (2011) juga menambahkan bahwa kegagalan tata kelola kolaboratif dapat menyebabkan fragmentasi kebijakan dan degradasi lingkungan, khususnya di kawasan wisata pesisir.

Dengan demikian, *collaborative governance* menjadi kerangka analitis yang tepat untuk mengkaji dinamika hubungan antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata, termasuk di destinasi pesisir seperti Pantai Mali yang memiliki karakteristik kompleks dan sensitif terhadap tekanan lingkungan.

b. Model Pentahelix dalam Pariwisata

Model pentahelix merupakan pengembangan dari konsep triplehelix yang awalnya menekankan kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan sektor industri dalam mendorong inovasi (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Konsep ini kemudian berkembang menjadi quadruplehelix dengan menambahkan unsur masyarakat dan selanjutnya menjadi pentahelix dengan memasukkan media sebagai aktor strategis dalam proses pembangunan (Carayannis & Campbell, 2010).

Dalam konteks pariwisata, model pentahelix dipandang sebagai pendekatan yang komprehensif karena melibatkan lima aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat lokal dan media. Kelima aktor ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam perencanaan, pengelolaan dan promosi destinasi wisata. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, akademisi sebagai penyedia pengetahuan dan riset, pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi, masyarakat sebagai pemilik dan penjaga sumber daya lokal serta media sebagai sarana komunikasi dan promosi (Sudiana & Mahadiansar, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan model pentahelix mampu meningkatkan kualitas tata kelola pariwisata dan mendorong keberlanjutan destinasi. Nugroho et al. (2018) menemukan bahwa kolaborasi multi-aktor dalam pengembangan pariwisata mampu meningkatkan daya saing destinasi sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat lokal. Sementara itu, Situmorang dan Mirzanti (2019) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat

dan aktor non-pemerintah dalam kerangka pentahelix berkontribusi pada terciptanya pariwisata berbasis komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, beberapa studi juga mencatat bahwa implementasi model pentahelix seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ketimpangan kekuasaan antar aktor, lemahnya koordinasi kelembagaan serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia (Saito & Ruhanen, 2017). Tanpa mekanisme *collaborative governance* yang kuat, kolaborasi pentahelix berpotensi berjalan secara simbolik dan tidak menghasilkan sinergi yang optimal.

Oleh karena itu, integrasi antara model pentahelix dan pendekatan *collaborative governance* menjadi penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Collaborative governance* menyediakan kerangka proses dan prinsip kolaborasi, sementara pentahelix menyediakan struktur aktor yang terlibat. Integrasi kedua pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji pengembangan pariwisata Pantai Mali, Kabupaten Alor, yang membutuhkan sinergi lintas sektor dalam mengelola potensi wisata alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **deskriptif** untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali, Kabupaten Alor. Lokasi penelitian dipilih karena Pantai Mali merupakan destinasi wisata pesisir yang memiliki potensi alam dan ekologi yang tinggi serta melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Informan penelitian ditentukan secara **purposive**, melibatkan unsur **pentahelix**, yaitu pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, akademisi dan media, yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam kepada 15 informan dari unsur pentahelix yaitu: pemerintah daerah berjumlah 4 orang, unsur masyarakat berjumlah 2 orang, unsur badan usaha berjumlah 3 orang, unsur akademisi 2 orang, unsur media 1 orang, sedangkan wisatawan berjumlah 3 orang. Observasi** dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan lembar observasi dan **dokumentasi berupa foto, dokumen kebijakan, dokumen pelaporan dan catatan lapangan.**

Analisis data dilakukan secara kualitatif tingkat partisipasi stakeholder pentahelix melalui pemberian skor kualitatif dengan indikator komunikasi, koordinasi, kepercayaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya melakukan tahapan **reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan**, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali.

Validitas data dijaga melalui **triangulasi sumber dan metode** guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan secara mendalam hasil penelitian mengenai implementasi *collaborative governance* berbasis pentahelix dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali, Kabupaten Alor. Pembahasan difokuskan pada tingkat partisipasi stakeholder serta keterkaitannya dengan dimensi *collaborative governance* menurut Thomson dan Perry (2006), yaitu komunikasi, koordinasi, kepercayaan dan pengambilan keputusan bersama.

a. Tingkat Partisipasi Stakeholder Pentahelix

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi stakeholder pentahelix dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali belum berjalan secara seimbang. Setiap aktor memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda sesuai dengan peran, kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Stakeholder Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Mali

Stakeholder	Peran Utama	Tingkat Partisipasi	Kategori	Permasalahan Utama
Pemerintah Daerah	Regulasi, perencanaan, fasilitasi	35%	Tinggi	Koordinasi lintas stakeholder belum terlembaga
Masyarakat Lokal	Pengelolaan operasional dan pelestarian	25%	Sedang	Keterlibatan terbatas pada level operasional
Pelaku Usaha	Penyedia jasa wisata dan UMKM	20%	Sedang	Investasi dan inovasi masih rendah
Akademisi	Riset dan pendampingan	10%	Rendah	Keterlibatan bersifat incidental
Media	Promosi dan publikasi destinasi	10%	Rendah	Promosi belum terintegrasi

Dominasi peran pemerintah daerah terlihat dari tingginya keterlibatan dalam aspek perencanaan dan regulasi. Namun, dominasi ini belum diiringi dengan mekanisme yang mampu mendorong partisipasi aktif stakeholder non-pemerintah secara setara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata Pantai Mali masih cenderung bersifat top-down.

b. Komunikasi Antar Stakeholder

Dalam perspektif *collaborative governance*, komunikasi merupakan prasyarat utama terbangunnya kolaborasi yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar stakeholder di Pantai Mali masih bersifat informal dan tidak berkelanjutan. Pertemuan lintas aktor belum dilakukan secara rutin dan lebih banyak terjadi pada momentum tertentu, seperti kegiatan seremonial atau program pemerintah seperti festival dugong.

Komunikasi Antar Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Mali dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Komunikasi Antar Stakeholder

No	Temuan Penelitian	Bentuk Nyata di Lapangan	Dampak terhadap Kolaborasi
1	Komunikasi antar stakeholder belum terstruktur	Tidak ada jadwal pertemuan rutin lintas actor	Informasi pengembangan pariwisata tidak terdistribusi merata

2	Komunikasi bersifat informal	Interaksi terjadi secara personal dan incidental	Tidak terbentuk pemahaman bersama antar stakeholder
3	Pertemuan lintas aktor bersifat temporer	Pertemuan hanya pada kegiatan seremonial atau program pemerintah	Komunikasi tidak berkelanjutan
4	Minim dokumentasi komunikasi	Tidak ada notulen atau tindak lanjut resmi	Program sulit disinkronkan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komunikasi antar stakeholder di pariwisata Pantai Mali masih bersifat informal dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini menghambat proses pembentukan pemahaman bersama yang menjadi inti *collaborative governance*. Thomson dan Perry (2006) menegaskan bahwa komunikasi intensif dan berkesinambungan diperlukan untuk membangun koordinasi dan kepercayaan antar aktor. Temuan ini juga sejalan dengan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa dialog tatap muka yang berkelanjutan merupakan fondasi utama keberhasilan kolaborasi lintas sektor.

c. Koordinasi dan Sinergi Kelembagaan

Koordinasi antar stakeholder pentahelix dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali belum terkelola secara sistematis. Belum terdapat forum kolaboratif formal yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, perencanaan bersama dan evaluasi program pariwisata. Akibatnya, setiap stakeholder cenderung menjalankan perannya secara parsial dan terpisah.

Tabel 3. Koordinasi dan Sinergi Kelembagaan Stakeholder Pentahelix

No	Temuan Penelitian	Kondisi Empiris	Dampak terhadap Pengembangan Pariwisata
1	Tidak adanya forum kolaboratif formal	Tidak tersedia wadah koordinasi lintas stakeholder	Perencanaan dan evaluasi program tidak terintegrasi
2	Pelaksanaan peran bersifat parsial	Setiap aktor menjalankan program sendiri	Sinergi antar stakeholder rendah
3	Koordinasi antar lembaga lemah	Tidak ada mekanisme pengendali kolaborasi	Potensi wisata belum dimanfaatkan optimal
4	Evaluasi program tidak kolektif	Evaluasi dilakukan sektoral	Perbaikan program tidak berkelanjutan

Tabel 3 menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di Pantai Mali dalam kolaborasi pentahelix belum terkelola secara sistematis. Menurut Thomson dan Perry (2006), koordinasi merupakan elemen penting untuk menyatukan sumber daya dan kewenangan antar aktor. Ketiadaan forum kolaboratif juga menghambat terciptanya sinergi sebagaimana ditegaskan oleh Emerson et al. (2012) bahwa koordinasi kelembagaan merupakan prasyarat efektivitas tata kelola kolaboratif.

d. Kepercayaan Antar Stakeholder

Kepercayaan merupakan elemen penting dalam *collaborative governance* karena menjadi dasar bagi kemauan aktor untuk berkolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antar stakeholder di Pantai Mali relatif ada, terutama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Namun, kepercayaan tersebut belum berkembang menjadi komitmen kolaboratif yang kuat.

Tabel 4. Kepercayaan Antar Stakeholder

No	Temuan Penelitian	Indikasi di Lapangan	Dampak terhadap Kolaborasi
1	Kepercayaan antar stakeholder relatif ada	Hubungan pemerintah dan masyarakat berjalan cukup baik	Kolaborasi dasar dapat berlangsung
2	Kepercayaan belum merata	Akademisi dan media kurang dilibatkan	Kolaborasi belum inklusif
3	Kepercayaan belum menjadi komitmen	Tidak ada kesepakatan kerja jangka panjang	Kolaborasi mudah terhenti
4	Relasi masih bersifat fungsional	Kerja sama terbatas pada kegiatan tertentu	Inovasi kolaboratif rendah

Kepercayaan yang belum berkembang menjadi komitmen kolaboratif menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix di Pantai Mali masih berada pada tahap awal. Thomson dan Perry (2006) menyatakan bahwa kepercayaan menjadi modal sosial utama dalam kolaborasi. Temuan ini sejalan dengan Bryson et al. (2015) yang menekankan pentingnya kepercayaan lintas aktor untuk menciptakan kemitraan strategis yang berkelanjutan.

e. Pengambilan Keputusan Bersama

Pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali masih didominasi oleh pemerintah daerah. Stakeholder lain umumnya hanya dilibatkan pada tahap implementasi atau sebagai penerima informasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making*) belum terwujud secara optimal.

Tabel 5. Pengambilan Keputusan Bersama

No	Temuan Penelitian	Praktik yang Terjadi	Dampak terhadap Keberlanjutan
1	Keputusan didominasi pemerintah daerah	Penentuan kebijakan dilakukan top-down	Rasa memiliki stakeholder lain rendah
2	Stakeholder lain dilibatkan secara terbatas	Pelibatan pada tahap implementasi	Partisipasi substantif rendah
3	Tidak ada mekanisme musyawarah formal	Keputusan tidak berbasis consensus	Tanggung jawab kolektif lemah

4	Aspirasi stakeholder belum terakomodasi	Masukan tidak selalu menjadi dasar keputusan	Program kurang adaptif
---	---	--	------------------------

Tabel 5 menunjukkan dominasi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa prinsip shared decision-making belum berjalan optimal. **Thomson dan Perry (2006)** menegaskan bahwa keputusan bersama memperkuat sense of ownership dan tanggung jawab kolektif. Kondisi empiris di Pantai Mali juga menguatkan pandangan **Ansell dan Gash (2008)** bahwa tanpa pelibatan aktif stakeholder, kolaborasi cenderung bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan.

f. Implikasi terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Ketimpangan peran stakeholder pentahelix serta lemahnya implementasi prinsip *collaborative governance* memberikan implikasi langsung terhadap keberlanjutan pengembangan pariwisata Pantai Mali. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial-budaya dan lingkungan. Ketidakseimbangan peran menyebabkan potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Secara ekonomi, dominasi pemerintah daerah tanpa dukungan optimal dari pelaku usaha dan media berdampak pada rendahnya investasi, terbatasnya inovasi produk wisata serta minimnya penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Secara sosial, partisipasi masyarakat yang masih bersifat operasional berpotensi melemahkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap destinasi. Sementara itu, dari aspek lingkungan, lemahnya peran akademisi dalam pendampingan dan kajian ilmiah berisiko menimbulkan praktik pengelolaan yang tidak berbasis keberlanjutan.

Untuk memperjelas implikasi tersebut, berikut disajikan tabel analisis implikasi *collaborative governance* terhadap dimensi keberlanjutan pariwisata Pantai Mali.

Tabel 6. Implikasi Peran Stakeholder terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pantai Mali

Dimensi Keberlanjutan	Kondisi Aktual	Dampak terhadap Pariwisata Pantai Mali	Implikasi Kebijakan
Ekonomi	Investasi swasta rendah, peran usaha masih terbatas	Pertumbuhan ekonomi lokal belum optimal, peluang kerja terbatas	Perlu insentif investasi dan kemitraan usaha berbasis kolaborasi
Sosial	Partisipasi masyarakat belum strategis	Rasa memiliki rendah, potensi konflik kepentingan	Penguatan peran masyarakat dalam perencanaan dan keputusan
Budaya	Kearifan lokal belum terintegrasi optimal	Daya tarik budaya kurang menonjol	Integrasi budaya lokal dalam produk wisata
Lingkungan	Pengelolaan belum berbasis kajian ilmiah	Risiko degradasi ekosistem pesisir	Pendampingan akademisi dan penguatan regulasi lingkungan
Kelembagaan	Tidak ada forum kolaboratif formal	Program pariwisata berjalan parsial	Pembentukan forum pentahelix berkelanjutan

Tabel 6 menunjukkan bahwa lemahnya *collaborative governance* berdampak sistemik terhadap seluruh dimensi keberlanjutan pariwisata. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi pentahelix menjadi kebutuhan strategis dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan forum kolaboratif yang melibatkan seluruh stakeholder secara setara, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata serta optimalisasi peran akademisi dan media sebagai penguat basis pengetahuan dan promosi destinasi.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *collaborative governance* yang menekankan pengambilan keputusan bersama, kepercayaan dan tanggung jawab kolektif sebagai fondasi utama pengembangan pariwisata berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *collaborative governance* berbasis pentahelix dalam pengembangan pariwisata Pantai Mali, Kabupaten Alor, belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antar stakeholder masih bersifat parsial dan belum terlembagakan secara sistematis. Komunikasi lintas aktor berlangsung secara informal dan tidak berkelanjutan, koordinasi kelembagaan belum difasilitasi melalui forum kolaboratif formal, serta kepercayaan antar stakeholder belum berkembang menjadi komitmen kolaboratif yang kuat. Selain itu, proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah daerah, sehingga prinsip

pengambilan keputusan bersama belum terwujud secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi Pantai Mali sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan *collaborative governance* melalui pembentukan forum kolaboratif pentahelix yang bersifat formal dan berkelanjutan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama. Pemerintah daerah diharapkan berperan sebagai fasilitator kolaborasi dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, peningkatan kapasitas stakeholder lokal, penguatan peran akademisi dan media sebagai mitra strategis, serta penerapan mekanisme komunikasi yang rutin dan transparan menjadi langkah penting untuk mendorong pengembangan pariwisata Pantai Mali yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66, 20–32.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69. <https://doi.org/10.4018/jsesd.2010010105>
- Hall, C. M. (2011). A typology of governance and its implications for tourism policy analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 437–457. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>
- Situmorang, D. B. M., & Mirzanti, I. R. (2019). Social entrepreneurship to develop ecotourism: A case study of community-based tourism in Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 7(2), 85–94. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2019.007.02.01>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a triple helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Nugroho, I., Negara, P. D., & Yuniar, H. R. (2018). The planning and development of tourism in Indonesia: A case study of sustainable tourism development in Batu City. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6(2), 73–84. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2018.006.02.01>

Saito, H., & Ruhanen, L. (2017). Power in tourism stakeholder collaborations: Power types and power holders. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, **31**, 189–196. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.01.001>

Sudiana, I. N., & Mahadiansar. (2020). Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata berbasis pentahelix. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, **8**(2), 95–108.